



RENJA 2025



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Renja merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kerja juga merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk mencapai tujuan (keluaran) yang sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Dokumen ini menjadi suatu acuan untuk pelaksanaan pembangunan agar program dan kegiatan yang dijalankan lebih terencana, terinci dan terstruktur. Efektifitas dan efisiensi merupakan hal yang sangat terkait dengan pelaksanaan pembangunan untuk menindaklanjuti rencana kerja yang telah disusun.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan ini juga merupakan representasi dari tugas pokok dan fungsi dari semua bidang yang ada. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 diharapkan bisa memberikan pondasi yang kuat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang terencana dengan baik tentunya akan memberikan keluaran dan hasil yang baik demi terwujudnya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan.

Kami sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 ini, sehingga kami sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun agar rencana kerja ini dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana yang diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**H. Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19681120 198903 1 006

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. STRUKTUR DAN KONDISI UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5
2.1. Kondisi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan	5
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	12
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.....	12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	14
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	16
BAB V. PENUTUP	17

BAB I. PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sangat penting dan strategis untuk menjadi tumpuan dalam mewujudkan tiga pilar pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikuatkan dengan ditetapkannya Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi andalan untuk peningkatan produksi perikanan dalam rangka penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sesuai dengan Visi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, yaitu **SUMSEL MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA** Dinas Kelautan dan Perikanan pada Misi Ke 1 yaitu Membangun Sumsel berbasis **ekonomi kerakyatan**, yang didukung sektor **pertanian, industri** dan **UMKM** yang tangguh untuk mengatasi **penggangguran** dan **kemiskinan** baik diperkotaan maupun di perdesaan, dan berada pada sasaran 3 yaitu **Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan**, ini sesuai dengan sasaran yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Paradigma pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang lebih diarahkan kepada paradigma baru, yaitu pembangunan perikanan yang difokuskan pada kegiatan : (1) budidaya perikanan, (2) rasionalisasi perikanan tangkap (kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum yang diarahkan pada penggunaan alat tangkap yang tidak membahayakan lingkungan perairan dan kelestarian sumberdaya perikanan, serta peningkatan mutu hasil tangkapan), (3) peningkatan mutu hasil dan nilai tambah produk hasil perikanan dan (4) pemeliharaan dan peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan. Untuk mewujudkan paradigma pembangunan sektor kelautan perikanan tersebut, maka diperlukan perencanaan strategis yang tepat. Hal ini dibutuhkan karena perencanaan strategi merupakan suatu pedoman bagi institusi dalam penyusunan program-program kerjanya.

Arah kebijakan dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya diharapkan juga memberikan pengaruh positif terhadap dunia usaha kelautan dan perikanan, seperti halnya pada tahun 2025 ini Provinsi Sumatera Selatan menentukan Fokus Pembangunan Daerah yang berkonsentrasi pada 4 (empat) unsur pokok yakni :

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur , Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata

3. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragam

Untuk mewujudkan hal yang telah disebutkan diatas maka perlu mensinergikan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan sehingga Keselarasan program dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota akan tercipta.

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja juga merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada RKPD Daerah. Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Sementara itu, baik Renja OPD ataupun RKPD menginduk pada Renstra OPD dan RPJMD yang keduanya mempunyai keterkaitan dengan Renstra KL dan RPJMN. Atas dasar inilah Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan tentu harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang membidangi kelautan dan perikanan, oleh karena itu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan juga Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk mensinergikan kegiatan APBD dan APBN yang ada disemua bidang sektor perikanan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar yang menjadi landasan penyusunan Renja OPD ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
9. Perda No. 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan;
10. Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renja Kelautan dan Perikanan ini, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

- I. Renja OPD dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan Kumpulan dari usulan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan melalui Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan juga Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.
- II. Renja disusun agar dapat menjadi media pelaksanaan apa yang menjadi target dan tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 – 2026, yang mana tahun 2025 merupakan periode kedua Renstra sehingga diharapkan target yang ditetapkan dapat menjadi titik tolak pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun mendatang.
- III. Renja OPD ini juga merupakan representasi dari arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan dari semua bidang yang ada sesuai tupoksinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renja ini mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang Sistematika Penyajian Rancangan Renja OPD tahun 2023 dengan format sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU



- 2.1 Kondisi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.2 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2022
- 2.3 Identifikasi Isu-isu Strategis
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II. STRUKTUR DAN KONDISI UMU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. Kondisi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan pasal 48 menyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi-fungsi yang diberikan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 49 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.
- b. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.
- c. Pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan Provinsi, serta perumusan dan penyiapan kebijaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
- e. Pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati perairan, serta perizinan kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- g. Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
- h. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.
- i. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- j. Pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
- k. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik Provinsi sesuai dengan masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Provinsi.
- l. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran.
- m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada Bab III Pasal 3 adalah sebagai berikut :



- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perikanan tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan
 3. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Produksi Pengembangan Usaha dan Desiminasi Teknologi Budidaya
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya
 3. Seksi Perbenihan dan Pengendalian Lingkungan Budidaya
- e. Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Mutu, Diversifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Hasil Perikanan dan Kelautan
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan dan Pulau-Pulau Kecil
 3. Seksi Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari 3 (dua) UPTD, yaitu :
 1. Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut, yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 8 dan pasal 9 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - Tugas Pokok adalah untuk merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan program yang terkait dengan bidang budidaya perikanan air payau dan laut.
 - Fungsi :
 - Penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
 - Penyediaan benih dan calon induk yang bermutu;
 - Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan laut;
 - Pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah dan kontaminasi penyakit, bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik dan toksin;

- Pelaksanaan uji lapang teknologi budidaya air payau dan laut;
 - Penyampaian laporan kegiatan UPTD;
 - Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksanaan serta Fungsional;
 - Pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 12 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas Pokok adalah untuk melakukan koordinasi, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam hal pengujian dan penerapan, bimbingan diversifikasi produk perikanan, sertifikasi produk serta penerapan mutu hasil perikanan.
 2. Fungsi :
 - Pelaksanaan pengujian dan penerapan mutu, keamanan pangan pangan hasil kelautan dan perikanan serta lembaga sertifikasi produk hasil perikanan;
 - Pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan SNI;
 - Pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - Pelaksanaan monitoring hasil perikanan;
 - Pengawasan dan pembinaan terkait kepegawaian, ketatausahaan, perencanaan anggaran, keuangan, pengolahan data dan penerbitan sertifikasi;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan bidang, instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengujian dan penerapan mutu;
 - Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana Fungsional;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Pelabuhan Perikanan Sungsang
- Tugas Pokok adalah untuk melaksanakan, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan sungsang.
 - Fungsi :
 - Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi operasional pelabuhan perikanan;
 - Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan bukti pencatatan (log book);
 - Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;

- Pelaksanaan penerbitan sertifikasi hasil tangkapan ikan;
 - Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar ;
 - Pelaksanaan pepembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
 - Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha;
 - Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
 - Pelaksanaan inspeksi pembokaran ikan;
 - Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - Pembagian tugas kepada kepala Subbagian dan Pelaksana serta Fungsional;
 - Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, yang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Bab VI pasal 23 mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Aset-aset yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan meliputi aset tanah dan bangunan, aset kendaraan dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dirinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2.1. Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (sampai dengan Maret 2023)

NO	JENIS	JUMLAH
1	SDM PNS (Berdasarkan Golongan)	
	a. Golongan IV	17
	- Laki-laki	11
	- Perempuan	6
	b. Golongan III	74
	- Laki-laki	46
	- Perempuan	28
	c. Golongan II	8
	- Laki-laki	8



NO	JENIS	JUMLAH
	- Perempuan	-
	<i>d. Golongan I</i>	2
	- Laki-laki	2
	- Perempuan	-
	<i>Total</i>	101
2	Honorar	
	<i>a. Honorar APBD</i>	14
	- Laki-laki	9
	- Perempuan	5
	<i>b. Honorar TKS</i>	30
	- Laki-laki	18
	- Perempuan	12
	<i>Total</i>	44
3	SDM PNS (Berdasarkan Jabatan)	
	<i>a. Pejabat Struktural</i>	27
	- Laki-laki	16
	- Perempuan	11
	<i>b. Pejabat Fungsional Tertentu</i>	20
	- Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan	9
	- Laki-laki	3
	- Perempuan	6
	- Fungsional Pengawas Perikanan Budidaya	2
	- Laki-laki	-
	- Perempuan	2
	- Fungsional Pengawas Perikanan Tangkap	2
	- Laki-laki	1
	- Perempuan	1
	- Fungsional Pengawas Perikanan	5
	- Laki-laki	4
	- Perempuan	1
	- Arsiparis	1
	- Laki-laki	-
	- Perempuan	1
	<i>c. Pejabat Fungsional Umum</i>	54
	<i>Total</i>	101
4	SDM PNS (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	
	a. Doktor / S3	
	- Laki-laki	-
	- Perempuan	-
	b. Magister / S2	
	- Laki-laki	11
	- Perempuan	16
	c. Sarjana / S1	
	- Laki-laki	33
	- Perempuan	16
	d. Diploma 4 / D4	
	- Laki-laki	6
	- Perempuan	1

NO	JENIS	JUMLAH
	e. Diploma 3 / D3	
	- Laki-laki	3
	- Perempuan	5
	f. Diploma 2 / D2	
	- Laki-laki	-
	- Perempuan	-
	g. Diploma / D1	
	- Laki-laki	-
	- Perempuan	-
	h. Sekolah Menengah Atas / SMA	
	- Laki-laki	8
	- Perempuan	-
	i. Sekolah Menengah Pertama / SMP	
	- Laki-laki	-
	- Perempuan	-
	j. Sekolah Dasar / SD	
	- Laki-laki	2
	- Perempuan	-

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Pada Tahun 2023, 28 (dua puluh delapan) Jabatan Struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel semuanya terisi.
2. Dari 28 (dua puluh delapan) Pejabat Struktural yang ada semuanya telah memenuhi persyaratan kepangkatan dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan untuk setiap Jabatan yang diduduki.
3. Pada tahun 2023, PNS yang menduduki jabatan fungsional berjumlah 20 orang yang terbagi atas fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan berjumlah 9 orang, Fungsional Pengawas Perikanan Budidaya berjumlah 3 orang, Fungsional Pengawas Perikanan Tangkap berjumlah 2 orang, Fungsional Pengawas Perikanan berjumlah 5 orang dan Fungsional Arsiparis berjumlah 1 orang

Tabel 2.1.2.2. Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

NO.	JENIS ASSET	LOKASI	LUAS (M2)		PEMANFAATAN SEKARANG	KET.
			TANAH	BANGUNAN		
1.	Bangunan Gedung Kantor	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring		216	Kantor	Terdaftar
2.	Rumah dinas	Jl. Veteran, Gg. Permata Merak RT 23 No. 68, Kel. Kuto Batu, Palembang	1.225	209	Rumah dinas	Terdaftar
3.	Kantor UPTD LPPMHP	Jl. Taman Sari KM 6, Palembang	-	622	Gedung Kantor UPTD LPPMHP	Terdaftar
4.	Rumah dinas Kepala UPTD LPPMHP	Jl. Taman Sari KM 6, Palembang	-	356	Gudang/perpustakaan	Terdaftar
5.	Kolam Tawar Air	Di Indralaya Kab. Ogan Ilir	92.005	-	Tanah Kolam	Terdaftar
6.	Kolam Tawar Air	Di Pampangan	400	-	Tanah Kolam	Terdaftar



			Kab. Ogan Komerling Ilir				
7.	Kolam Tawar	Air	Di Pagar Alam Kab. Pagar Alam	6.877	-	Tanah Kolam	Terdaftar
8.	Kolam Tawar	Air	Di Pengadonan Kab.OKU	6.401	-	Tanah Kolam	Terdaftar
9.	Kolam Tawar	Air	Di Belitang Kab. OKUT	3.454	-	Tanah Kolam	Terdaftar
10.	Kolam air tawar		Di Muara Beliti Kab. MURA	65.322	-	Tanah Kolam	Terdaftar
11.	Kolam air tawar		Di Tugumulyo Kab MURA	6.044	-	Tanah Kolam	Terdaftar
12	Tanah Bangunan Gedung		Di Kab Lubuk Linggau	60.447		Bangunan Kantor	Terdaftar

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Secara hirarki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah OPD dibawah naungan Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus memperhatikan kebijakan dari Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia itu sendiri yang berlaku secara nasional. Kebijakan – kebijakan tersebut diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
2. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan.
3. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita.
4. Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
5. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah penerbitan sertifikasi produk hasil perikanan.
7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Kawasan Korsevasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
8. Meningkatnya pengawasan luas wilayah perairan Indonesia oleh aparaturngawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Jumlah orang yang dibina dalam rangka penurunan ilegal fishing (orang)

Kebijakan diatas tentunya diselaraskan dengan isu pembangunan yang ada di Sumatera Selatan yang tentunya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, beberapa hal yang menjadi sasaran pembangunan di sumatera selatan diantaranya tertuang dalam kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Rendahnya pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemasar);
2. Rendahnya produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
3. Rendahnya harga jual komoditas ikan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perairan umum;
5. Menurunnya sumber daya ikan di laut dan perairan umum akibat tekanan penangkapan, *illegal fishing*;
6. Masih terbatasnya sarana, prasarana dan modal produksi para pelaku usaha.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki secara optimal dan bertanggung jawab;
2. Meningkatkan dan memanfaatkan jaringan pasar komoditas kelautan dan perikanan di dalam maupun luar negeri; dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perairan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya ikan.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan, maka telah dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan potensi perairan umum dan laut secara optimal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan promosi dan kerja sama untuk meningkatkan jaringan pemasaran dan investasi kelautan dan perikanan di dalam maupun luar negeri;
3. Memberdayakan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pemberian pelatihan, percontohan dan bantuan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan perairan dengan merehabilitasi dan menjaga lingkungan perairan bersama aparat penegak hukum dan masyarakat; dan
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan infrastruktur kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah kebijakan-kebijakan seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, diantaranya adalah : Peningkatan Produksi Perikanan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan serta Fokus Pembangunan 2025 daerah yang berkonsentrasi pada 4 (empat) unsur pokok yakni :

1. *Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia*
2. *Pertumbuhan Ekonomi Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur , Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata*
3. *Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana*
4. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragam*

Dari hal – hal diatas yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan oleh bidang dan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun bidang dan UPTD pada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mencakup 4 (empat) bidang teknis dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu:

- 1) Bidang Perikanan Tangkap
- 2) Bidang Perikanan Budidaya
- 3) Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- 4) Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 5) UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut
- 6) UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), dan
- 7) UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang

Bidang teknis dan UPTD tersebut bekerja untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pembuat kebijakan dalam hal pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Program Tahun sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang telah dibayar gaji dan tunjangan ASN
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
a	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor



No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi
a	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K
b	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Direhabilitasi
II	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
a	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
a	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil



b	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
II	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
A	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan
III	Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
A	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia
b	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
a	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko
b	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
c	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil



NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
a	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif

6. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
a	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko
b	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
II	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
a	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
III	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
a	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir



Tabel
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Terlayani	Palembang	100%	24.750.600.435	APBD		100%	26.628.596.238	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	4 Dokumen	1.017.000.000	APBD		4 Dokumen	1.017.000.000	Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perancangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	2 Dokumen	800.000.000	APBD		2 Dokumen	800.000.000	Peningkatan Profesionaltias ASN	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	1 Laporan	17.000.000	APBD		1 Dokumen	17.000.000	Peningkatan Profesionaltias ASN	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	1 Laporan	200.000.000	APBD		1 DOKumen	200.000.000	Peningkatan Profesionaltias ASN	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palembang	105 Orang/Bulan	18.283.110.100	APBD		105 Orang/Bulan	19.555.217.938	Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	105 Orang/Bulan	15.592.012.100	APBD		105 Orang/Bulan	16.418.217.938	Peningkatan Profesionaltias ASN	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	1 Dokumen	2.674.098.000	APBD		1 Dokumen	3.120.000.000	Peningkatan Profesionaltias ASN	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeseteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Palembang	1 Laporan	17.000.000	APBD		1 Laporan	17.000.000	Peningkatan Profesionaltias ASN	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Palembang	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Jenis	150.000.000	Peningkatan Pengelolaan Aset	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Jenis	150.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Palembang	1 Dokumen	380.000.000	APBD		1 Dokumen	500.000.000	Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palembang	1 Paket	150.000.000	APBD		1 Paket	150.000.000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palembang	10 Orang	230.000.000	APBD		10 Orang	350.000.000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	7 Kegiatan	2.240.490.335	APBD		7 Kegiatan	2.806.378.300	Peningkatan Pengelolaan Aset	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	1 Paket	120.000.000	APBD		1 Paket	200.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	1 Paket	800.000.000	APBD		1 Paket	790.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Palembang	1 Paket	235.490.335	APBD		1 Paket	431.378.300	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Palembang	1 Paket	230.000.000	APBD		1 Paket	230.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	1 Laporan	200.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	1 Laporan	655.000.000	APBD		1 Laporan	955.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palembang	14 Jenis	875.000.000	APBD		14 Jenis	975.000.000	Peningkatan Pengelolaan Aset	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	675.000.000	APBD		1 Laporan	775.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	200.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Palembang	66 Unit	1.875.000.000	APBD		66 Unit	1.625.000.000	Peningkatan Pengelolaan Aset	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palembang	32 Unit	475.000.000	APBD		32 Unit	475.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	4 Unit	1.000.000.000	APBD		4 Unit	900.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	15 Unit	150.000.000	APBD		15 Unit	150.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	1 Unit	250.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif
	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Ilegal Fishing dan Luas Kawasan Pesisir yang di Rehabilitasi	Sumatera Selatan		800.000.000	APBD			900.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	3.25.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi	Sumatera Selatan		625.000.000	APBD			650.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	OKI	976 Ha	500.000.000	APBD		1 Dokumen	500.000.000	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Komoditas Unggulan	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	OKI dan Banyuasin	10 Ha	125.000.000	APBD		10 Ha	150.000.000	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Komoditas Unggulan	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.03	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sumatera Selatan		175.000.000	APBD			250.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	OKI dan Banyuasin	60 Orang	175.000.000	APBD		60 Orang	250.000.000	Pengembangan Kualitas SDM	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Sumatera Selatan	104,5	2.900.000.000	APBD		104,7	4.200.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	3.25.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Sumatera Selatan		550.000.000	APBD			650.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Muba, OKI dan Banyuasin	30 Unit	550.000.000	APBD		25 Unit	650.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumatera Selatan		1.150.000.000	APBD			1.850.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Sumatera Selatan	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Sumatera Selatan	300 Unit	1.050.000.000	APBD		200 Unit	1.750.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.03	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Sumatera Selatan		150.000.000	APBD			150.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Sumatera Selatan	100%	150.000.000	APBD		50 Rekomendasi	150.000.000	Pengembangan Kualitas SDM	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.06	Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Banyuasin (Pelabuhan Perikanan Sungsang)		1.050.000.000	APBD			1.550.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Banyuasin (Pelabuhan Perikanan Sungsang)	1 Unit	500.000.000	APBD		1 Unit	1.000.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Banyuasin (Pelabuhan Perikanan Sungsang)	1 Layanan	550.000.000	APBD		1 Layanan	550.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Sumatera Selatan	94,35	2.900.000.000	APBD		94,5	3.800.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumatera Selatan		200.000.000	APBD			200.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Sumatera Selatan	36 Rekomendasi	100.000.000	APBD		36 Rekomendasi	100.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Sumatera Selatan	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Sumatera Selatan		550.000.000	APBD			550.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Selatan	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	OKI (UPTD BBPAPL)	1 Unit	300.000.000	APBD		1 Unit	300.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Sumatera Selatan	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.06	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Sumatera Selatan		2.150.000.000	APBD			3.050.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Selatan	120 Unit	1.850.000.000	APBD		60 Unit	2.650.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	BBI Air Saten	1 Unit	300.000.000	APBD		1 Unit	400.000.000	Peningkatan Sarana Produksi	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Illegal Fishing dan Luas Kawasan Konservasi	Sumatera Selatan	280 Orang dan 1.500 Ha	575.000.000	APBD		280 Orang dan 1.500 Ha	1.000.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	3.25.05.1.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	Sumatera Selatan	7 Kelompok	425.000.000	APBD		10 Kelompok	700.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Sumatera Selatan	10 Pelaku Usaha	200.000.000	APBD		10 Pelaku Usaha	250.000.000	Pengembangan Kualitas SDM	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Sumatera Selatan	7 Kelompok Masyarakat	225.000.000	APBD		7 Kelompok Masyarakat	450.000.000	Pengembangan Kualitas SDM	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.02	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumatera Selatan	7 Kelompok	150.000.000	APBD		10 Kelompok	300.000.000	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Sumatera Selatan	50 Pelaku Usaha	50.000.000	APBD		50 Pelaku Usaha	100.000.000	Pengembangan Kualitas SDM	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Sumatera Selatan	50 Pelaku Usaha	50.000.000	APBD		7 Kelompok Masyarakat	100.000.000	Pengembangan Kualitas SDM	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Sumatera Selatan	50 Pelaku Usaha	50.000.000	APBD		7 Kelompok Masyarakat	100.000.000	Pengembangan Kualitas SDM	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Sumatera Selatan	44 kg/kapita/tahun	1.675.000.000	APBD		44,5 kg/kapita/tahun	2.280.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	3.25.06.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumatera Selatan		275.000.000	APBD			350.000.000	Peningkatan Kualitas Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Sumatera Selatan	1 Dokumen	275.000.000	APBD		1 Dokumen	350.000.000	Peningkatan Hasil Olahan Pasca Panen Komoditi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan yang Berkualitas	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Sumatera Selatan		975.000.000	APBD			1.380.000.000	Peningkatan Kualitas Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Sumatera Selatan	1 Kegiatan	550.000.000	APBD		1 Kegiatan	600.000.000	Peningkatan Hasil Olahan Pasca Panen Komoditi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan yang Berkualitas	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Sumatera Selatan	1 Kegiatan	425.000.000	APBD		1 Kegiatan	780.000.000	Peningkatan Hasil Olahan Pasca Panen Komoditi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan yang Berkualitas	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.06.1.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumatera Selatan		425.000.000				550.000.000	Peningkatan Kualitas Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
	3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	Sumatera Selatan	1 Sistem Informasi	425.000.000	APBD		1 Dokumen	550.000.000	Peningkatan Hasil Olahan Pasca Panen Komoditi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan yang Berkualitas	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
Jumlah						33.600.600.435				38.808.596.238		

Palembang, Juni 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Selatan



Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196811201989031006

BAB V. PENUTUP

Kami berharap bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 yang kami susun ini dapat menjadi acuan dan tolak ukur pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dengan harapan :

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja [Renja OPD] tahun anggaran 2024 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis [Renstra OPD] tahun keempat, mengenai target dan capaian indikator kinerja utama serta target pelayanan jangka menengah didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah [RPD] 2024 – 2026.
- c. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- d. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.